

Tanggung Jawab dan Solusi Atas Sertipikat Hak Milik Sementara yang Tumpang Tindih = Responsibility and Solution For Overlapping Provisional Property Certificates

Nabilah Mardiyah Alkadrie, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20527380&lokasi=lokal>

Abstrak

Kasus tanah sengketa seringkali terjadi di Indonesia, permasalahan tersebut timbul akibat adanya perselisihan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Permasalahan tanah sengketa yang sering kali terjadi di Indonesia hingga membutuhkan penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah permasalahan tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah. Hal ini sering terjadi karena adanya kesalahan pada penerbitan sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh pegawai/pejabat BPN, salah satu contoh kasusnya terdapat dalam Putusan Tata Usaha Negara, yang terjadi di Kelurahan BML, Kecamatan X Selatan, Kota X. Pada kasus ini, penulis menganalisis bagaimana tanggung jawab yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota X dalam menjalankan fungsi dan tugasnya memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dengan sertipikat sementara berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi preskriptif dan jenis data sekunder. Dari hasil analisis terhadap putusan tersebut, dapat diketahui bahwa pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan dilakukan dengan tidak teliti dan cermat. Pada data yang ada dapat diketahui Kantor Pertanahan telah menerbitkan SHM Nomor 49, Kampung BM pada tahun 1963, sertipikat tersebut dikeluarkan dengan buku tanahnya saja. Kemudian kantor pertanahan terus meneruskan menerbitkan SHM di atas bidang tanah yang sama dengan nama berbeda tanpa membatalkan SHM No. 49/Kampung BM. Sehingga menimbulkan permasalahan tumpang tindih hak atas tanah. Simpulan penelitian adalah kantor pertanahan tidak melakukan tanggung jawabnya untuk melakukan pembatalan pada sertipikat hak yang tumpang tindih. Sertipikat sementara tersebut tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.

.....Land dispute cases often happen in Indonesia, these problems arise due to the strife between individuals, individual with group and group with group. Land dispute problems that often occur in Indonesia and require settlements through the courts are the overlapping land ownership rights. These often happen because of the errors found in the issuance of land rights certificates issued by BPN employees/officials, an example of this case is in State Administrative Decisions, which occurred in BML Village, South P District, P City. In this case, the writer analyze how is the liability given by the P City Land Office in carrying out their functions and duties and legal protection for rights holders with temporary certificates based on State Administrative Decision. This research uses normative juridical method with prescriptive typology and secondary data types. From the results of the analysis on the decision, it is known that the land registration carried out by the Land Office was carried out with carelessness and scrutiny. Based on the available data that can be seen in the Land Office issue SHM Number 49, Kampung BM in 1963, the certificate was issued only with the land book. Then the land office continuously issuing the SHM on the same plot of land with a different name without canceling the SHM No. 49/Kampung BM. This creates the problem of overlapping land rights. The conclusion of the research is that the land office does not cancels 9 disputed objects that have been issued as a form of liability. And protection for land rights holders

with temporary certificates has not been gotten the protection as it should have.